

**RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI**

**PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA  
DIPAILITKAN**



**Disusun oleh :**

**Franzisca Tuto Nugi Nimunuho**

**NPM : 100510273**

**Program studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI**

**PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA**  
**DIPAILITKAN**



Diajukan oleh :

Franzisca Tuto Nugi Nimunuho

NPM : 100510273

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Ign. Sumarsono R., S.H., M.Hum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.L.M.**

- I. Judul : Pemenuhan Hak Bagi Para Kreditor yang Debitornya Dipailitkan
- II. Chika, Sumarsono
- III. Ilmu Hukum / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract

*Monetary crisis in 1997 caused many entrepreneurs to loan for financing activities. Many entrepreneurs are compulsory to take debts from domestic or foreign companys to survive in competitive condition. That condition made a new problem. The new problem that aoccur is as the debt settelment. So, regulations are needed to guarantee creditor's and debtor's rights. Our government has made a regulation to guarantee the fulfillment of creditor's and debtor's rights. But, the regulation does not enough, because we do not have system which saves a creditor's rights in bankruptcy procedure. From the above background, which the writing of this essay is to explain how the fulfillment of rights of creditors if debtor which bankrupt? This research is empirical research. The primary data are from interview result with informant who experts in bankruptcy procedure. The conclusion of the research indicates that fulfillment creditor's right has not ended very well because there's no consistency in bankruptcy procedure. A competence which given to the court of commerce to detained a not cooperative debtor rarely implemented. That condition is being inhibited to fulfilment creditor's rights. Other parties in bankruptcy procedure often not cooperative to each other too. This condition is used to get personal benefit. There should be a cooperative attitude between all of parties to fulfill the creditor's right.*

**Keywords: bankruptcy, fulfillment of creditor's right, debtors.**

## V. Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 membuat perekonomian Indonesia belum seutuhnya stabil bahkan sampai saat ini. Banyak dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena permasalahan ekonomi tersebut. Modal yang dimiliki oleh para pengusaha sebagian besar merupakan pinjaman dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan.

Hal tersebut telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat<sup>1</sup>. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah lembaga kepailitan.

Selain itu lembaga kepailitan juga merupakan realisasi dari Pasal 1131 dan 1132 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Pasal 1131 BW pada intinya menyatakan bahwa segala harta debitor menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sedangkan Pasal 1132 BW menyatakan bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor secara seimbang, kecuali ada alasan untuk didahulukan. Kedua pasal tersebut memang menjadi inti dari lembaga kepailitan. Peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang kita miliki belum sepenuhnya mendukung kedua pasal tersebut.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur dengan jelas kepastian hukum para kreditor yang debitornya dipailitkan. Misalnya saja, tidak adanya jangka waktu yang jelas kapan kreditor mendapatkan pemenuhan piutang dari debitor yang dipailitkan. Selain itu tidak ada satu pasalpun yang menjamin bahwa kreditor akan mendapatkan piutangnya. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan, namun sekali lagi sama sekali tidak ada kepastian. Sedangkan dalam Pasal 228 ayat (6) UU KPKPU mengatur bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh lebih dari 270 hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayar utang diucapkan. Namun untuk proses kepailitan sama sekali tidak ditentukan batas waktu pemenuhan piutang bagi para kreditornya.

#### Rumusan Masalah

Bagaimanakah pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan?

#### VI. Isi Makalah

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

# 1. Pengaturan Pemenuhan Hak Bagi Para Kreditor yang Debitornya Dipailitkan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri dari 7 bab dan 308 pasal. Ir. I. Emir Moeis, M.Sc. menyampaikan bahwa dengan pengesahan UU KPKPU ini diharapkan dapat semakin membuat rasa aman dan kepastian hukum bagi investor, baik dalam maupun luar negeri. Penjelasan Umum UU KPKPU juga menegaskan faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan kewajiban pembayaran utang, yaitu<sup>2</sup>:

- a. untuk menghindari perebutan harta debitor bila kreditor menagih piutangnya,
- b. untuk menghindari perbuatan curang dari kreditor separatis yang menguntungkan dirinya sendiri,
- c. untuk menghindari kecurangan antara debitor dan salah seorang kreditor.

Berdasarkan risalah pembahasan RUU KPKPU tersebut tidak terlalu diperdebatkan mengenai batas waktu penyelesaian perkara kepailitan. Ketentuan yang diperbincangkan lebih banyak mengenai teknis penyelesaian serta dampaknya bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa ini adalah salah satu celah yang terdapat pada UU KPKPU. Bab III UU KPKPU mengatur mengenai Kewajiban Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) sebagai alternatif dari kepailitan. Bahkan dalam Pasal 225 ayat (2) dan (3) mewajibkan pengabulan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor maupun kreditor. Bahkan apabila PKPU dikabulkan, tahapan kepailitan diberhentikan sementara sampai PKPU

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum UU KPKPU



selesai. Sehingga dapat dikatakan bahwa PKPU lebih diprioritaskan daripada kepailitan, dilihat dari dampak yang disebabkan oleh PKPU juga lebih ringan dan mudah diterima daripada kepailitan. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari PKPU sendiri, yaitu memungkinkan debitor pailit melanjutkan usahanya untuk menghindari kepailitan<sup>3</sup>. Menurut Petrus Bala Pattyona, pelaksanaan PKPU ini tidak ada gunanya kalau memang debitor tidak memiliki asset dan itikad baik untuk mengusahakan pelunasan utangnya<sup>4</sup>.

## 2. Pemenuhan Hak Bagi Para Kreditor yang Debitornya Dipailitkan

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan tentunya sangat didambakan oleh semua pihak. UU KPKPU yang sudah mulai dibahas sejak tahun 2002 ini, secara teoritis memang sudah menjamin pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan. Dimana dalam UU KPKPU tersebut sudah mengatur pengurusan serta pemberesan harta pailit hingga rehabilitasi setelah proses kepailitan itu selesai. Namun dalam prakteknya, masih ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan UU KPKPU. Kelemahan ini mengakibatkan berkurangnya kemungkinan pemenuhan piutang kreditor. Sebagaimana yang diungkapkan oleh advokat, mediator sekaligus kurator, Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. bahwa UU KPKPU perlu revisi karena beberapa kelemahan, yaitu :

- a. Tidak adanya sanksi untuk debitor pailit yang melarikan diri ataupun tidak bersikap kooperatif,
- b. Tidak adanya upaya paksa untuk mengeksekusi harta pailit debitor,
- c. Kurator yang menjadi sasaran kreditor yang menuntut pemenuhan haknya, dan tidak ada perlindungan hukumnya<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Rahayu Hartini, 2008; *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang

<sup>4</sup> Wawancara dengan Petrus Bala Pattyona, S.H., M.Hum., pada Jumat, 7 Maret 2014 pk. 13.00 di Kantor Hukum

<sup>5</sup> Wawancara dengan Petrus Bala Pattyona, S.H., M.Hum., pada Jumat, 7 Maret 2014 pk. 13.00 di Kantor Hukum

Kepailitan sendiri sebenarnya tidak menjamin bahwa kreditor akan mendapatkan piutangnya. Hal ini terjadi bila debitor pailit memang benar-benar tidak memiliki asset sama sekali. Di Jakarta, Petrus Bala Pattyona sudah beberapa kali menghadapi hal seperti ini. Bila terjadi hal seperti ini, kuratorlah yang bingung. Kurator bingung karena harus menghadapi kreditor yang terkadang memaksa pemenuhan utangnya padahal asetnya tidak ada.

Masyarakat dewasa ini sedikit demi sedikit sudah mengerti tentang kepailitan. Menurut Dijan Widijowati, ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah perkara kepailitan yang diajukan menurun, antara lain<sup>6</sup>:

- a. Masih adanya beberapa ketentuan dalam UU KPKPU yang masih multi tafsir. Contohnya yaitu ketentuan dalam Pasal 55 UU KPKPU

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Pasal 55 UU KPKPU menyatakan bahwa kreditor yang memegang hak-hak tersebut atau biasa disebut kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Padahal Pasal 56 UU KPKPU mengatur bahwa hak mengeksekusi tersebut ditangguhkan 90 hari sejak putusan dibacakan. Terdapat antinomi diantara kedua pasal tersebut sehingga dapat menimbulkan multitafsir<sup>7</sup>.

- b. Masyarakat belum menganggap Pengadilan Niaga bersih, berintegritas, mampu, serta efektif.
- c. Hakim *ad hoc* dianggap tidak optimal. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung

<sup>6</sup> Dijan Widijowati, 2012;231, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

<sup>7</sup> Diakses dari <http://hery-shietra.blogspot.com/2013/10/undang-undang-kepailitan-yang.html>  
Rabu, 14 Mei 2014 pk. 16.15 WIB.

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc* sudah dengan jelas pemberian wewenang kepada Hakim *Ad Hoc*. Menurut Bambang Widjojanto, salah satu praktisi hukum terkemuka di Indonesia, tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Hakim *Ad Hoc* terlihat dari putusan hakim yang tidak memuaskan masyarakat sama sekali, sehingga masyarakat makin tidak percaya dengan institusi pengadilan<sup>8</sup>.

- d. Penyelesaian nonlitigasi dianggap lebih efektif.
- e. Masyarakat melihat tidak efektifnya peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan sebelum berlakunya UU KPKPU. Munir Fuady berpendapat, saat ini kepailitan memang tak lagi efektif untuk menyelesaikan masalah utang piutang. "Banyak orang kecewa, banyak pengamat kecewa, banyak orang yang terlibat langsung kecewa dengan keadaan sekarang. Jadi sebenarnya, harapan masyarakat terlalu besar bahwa UUK akan menyelesaikan masalah utang piutang". Menurutnya penyebab yang lain terkait dengan simpang siurnya penafsiran UU KPKPU oleh Pengadilan Niaga. Hal ini membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada Pengadilan Niaga<sup>9</sup>.

Meningkatnya jenjang pendidikan masyarakat membuat masyarakatpun semakin pandai memilih upaya hukum. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dedi Fardiman, S.H., M.H. selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, masyarakat mulai memilih untuk penyelesaian sengketa utang-piutang menggunakan *alternative dispute resolution*. Petrus Bala Pattyonapun sependapat, karena dirinya pun pernah beberapa kali diminta menjadi mediator untuk penyelesaian utang piutang. Menurut Petrus, biaya yang dikeluarkan juga lebih ringan daripada pengajuan kepailitan. Terkadang permohonan kepailitan terhadap debitor hanyalah untuk menjatuhkan debitor tersebut. Terjadi pergeseran tujuan dan hakikat dari kepailitan itu sendiri, menurutnya.

<sup>8</sup> Diakses dari <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/04/10/0022.html> Rabu, 14 Mei 2014 pk. 16.59 WIB.

<sup>9</sup> Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8187/kepailitan-di-simpang-jalan> Rabu, 14 Mei 2014 pk. 16.20 WIB.



Kendala yang terjadi setelah permohonan kepailitan dikabulkan ini, salah satunya disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU mengharuskan dikabulkannya permohonan pernyataan pailit asalkan sudah memenuhi 2 syarat kepailitan. Berdasarkan pasal ini pula, pelaksanaan sidang kepailitan sangatlah singkat. Sidang permohonan kepailitan hanyalah berlangsung 1 (satu) kali, yaitu untuk membacakan putusan dari majelis hakim mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan pailit tersebut<sup>10</sup>. Hal ini terjadi bila proses pemeriksaan dilakukan sebelum sidang, yaitu setelah pemohon pailit menyerahkan berkas-berkas untuk membuktikan bahwa syarat kepailitan sudah terpenuhi diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim. Sidang pertama harus dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah permohonan pailit didaftarkan<sup>11</sup>. Selain itu, Pasal 8 ayat (5) UU KPKPU mengatur bahwa Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan didaftarkan. Penetapan permohonan kepailitan seringkali tanpa memperhitungkan asset yang dimiliki oleh debitor. Padahal harapannya dengan dipailitkannya debitor, hartanya dapat membayar kembali seluruh utangnya secara adil dan merata serta seimbang. UU KPKPU memang tidak mengharuskan adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asset yang dimiliki debitor sebelum penjatuhan pailit. Ketentuan Pasal 8 ini sesungguhnya tidak salah, namun perlu dilengkapi dengan kewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu asset yang dimiliki oleh debitor agar benar-benar dapat menjamin pemenuhan hak kreditor.

Ketentuan yang ada dalam UU KPKPU sesungguhnya sudah berusaha disusun sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu menjamin kepastian hukum bagi para kreditor maupun debitor. Namun dalam praktek tidak semudah itu menjalankan seluruh ketentuan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan FX. Denny S. Aliandu, S.H., staff legal pada Kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona, SH., MH. & Rekan tanggal 5 Mei 2014 pk 17.00

<sup>11</sup> Lihat Pasal 6 ayat (6) UU KPKPU

yang ada dalam UU KPKPU tersebut. Menurut para praktisi, banyak kendala yang dihadapi dalam menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain yaitu tidak kooperatifnya sikap dan sifat debitor serta kreditor. Banyak contoh debitor yang tidak kooperatif sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, banyaknya debitor yang melarikan diri ataupun menyembunyikan assetnya. Sedangkan contoh kreditor yang tidak kooperatif adalah tidak hadirnya kreditor dalam rapat kreditor, padahal rapat tersebut untuk kepentingannya juga. Bila hal ini terjadi, kurator dan hakim pengawas tidak punya wewenang untuk memaksa debitor dan kreditor tersebut karena dalam UU KPKPU tidak mengatur mengenai hal tersebut.

## VII. Kesimpulan

Pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan seringkali tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai proses pemenuhan hak tersebut. Kewenangan untuk menahan debitor yang dirasa kurang kooperatif yang diberikan oleh UU KPKPU seringkali tidak digunakan oleh Pengadilan Niaga. Hal ini menyebabkan tidak jarang debitor pailit yang melarikan diri. Bila debitor sudah melarikan diri, pemenuhan hak para kreditorpun menjadi terhambat. Selain itu masih terdapat antinomi diantara pasal dalam UU KPKPU tersebut juga menyebabkan adanya perbedaan paham dalam pelaksanaannya.

Sifat kurang kooperatif tidak hanya ditunjukan oleh debitor, dalam perkara kepailitan, pihak yang lainpun tak jarang bersikap tidak kooperatif. Sifat tidak kooperatif oleh kreditor, misalnya tidak menghadiri rapat kreditor ataupun terlambat untuk melakukan mendaftarkan tagihan utangnya. Hakim pengawas dan kuratorpun tidak selamanya benar. Pada prakteknya tak jarang adanya kerjasama antara debitor dengan kedua pihak

tersebut. Kerjasama ini tentu saja hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan merugikan pihak yang lain. Kerjasama yang merugikan ini dapat menghambat pemenuhan bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan.

Pemenuhan hak kreditor yang debitornya dipailitkan dapat berjalan dengan baik apabila adanya konsistensi dalam pelaksanaan UU KPKPU oleh semua pihak terkait.

## VIII. Daftar Pustaka

### **Buku**

Hartini, Rahayu, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

Widijowati, Dijan, 2002, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

### **Internet**

<http://hery-shietra.blogspot.com/2013/10/undang-undang-kepailitan-yang.html>, Diakses pada Rabu, 14 Mei 2014 pk. 16.15 WIB.

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/04/10/0022.html> Diakses pada Rabu, 14 Mei 2014 pk. 16.59 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8187/kepailitan-di-simpang-jalan> Diakses pada Rabu, 14 Mei 2014 pk. 16.20 WIB.

### **Hasil Wawancara**

Narasumber: Petrus Bala Pattyona, S.H., M.Hum. Jumat, 7 Maret 2014 pk. 13.00 di Kantor Hukum Advokat dan Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt. 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta Selatan.

Narasumber: Fx. Denny S. Aliandu, S.H. staff legal pada Kantor Hukum Advokat dan Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., dan Rekan tanggal 5 Mei 2014 pk 17.00.